

Dana Pihak Ketiga dalam Pertumbuhan Aset dan Efisiensi, serta Tantangan Pengaruh Pembiayaan UMKM dan Manajemen Risiko pada BPRS di Indonesia

Yudi Siyamto^{1*)}, Sumadi²⁾

^{1*)}Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Indonesia

²⁾Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

yudi.siyamto@live.com^{1*)}, ahmadsumadi1924@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kinerja aset, efisiensi penyaluran dana, serta risiko pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan perangkat lunak Stata melalui tiga model utama yang menguji determinan aset, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non-Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berperan sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan aset BPRS, sementara pembiayaan UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana yang tercermin pada FDR. Sebaliknya, baik DPK maupun pembiayaan UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sehingga diperlukan penguatan manajemen risiko dan tata kelola internal di luar ekspansi volume pembiayaan. Temuan ini memperkuat dan memperluas teori intermediasi keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran BPRS dalam pengembangan keuangan mikro syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: BPRS, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan UMKM, FDR, NPF.

Abstract

This study aims to analyze the effect of Third-Party Funds (TPF) and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) financing on asset performance, fund intermediation efficiency, and financing risk of Islamic Rural Banks (BPRS) across Indonesian provinces during the 2020–2024 period. The research utilizes secondary data from the Islamic Banking Statistics published by the Financial Services Authority (OJK). Panel data regression analysis was conducted using Stata through three main models examining the determinants of assets, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), and *Non-Performing Financing* (NPF). The findings reveal that TPF serves as the primary driver of asset growth in BPRS, while MSME financing positively and significantly enhances fund intermediation efficiency as reflected in the FDR. Conversely, neither TPF nor MSME financing significantly affect the NPF, suggesting the need to strengthen risk management and internal governance beyond the expansion of financing volume. These findings reinforce and extend the Islamic financial intermediation theory and provide practical policy insights to strengthen the strategic role of BPRS in advancing inclusive and sustainable Islamic microfinance.

Keywords: Syariah Rural Bank, Third-Party Funds, MSME Financing, FDR, NPF.

Pendahuluan

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi lokomotif utama penggerak ekonomi di Indonesia, dimana kontribusi UMKM bukan hanya terlihat pada penyediaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan, tetapi juga pada ketahanannya menghadapi berbagai krisis, termasuk pandemi global beberapa tahun terakhir. Namun demikian, faktor hambatan pembiayaan masih menjadi persoalan klasik bagi sektor ini. Lembaga keuangan konvensional relatif terbatas menjangkau UMKM skala mikro di pelosok, sehingga kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengambil peran sentral sebagai ujung tombak inklusi keuangan syariah (Akbar, 2024; Pratama & Relaksana, 2025; Wahab & Mahdiya, 2025).

Peran BPRS dalam mendorong pembiayaan inklusif bagi UMKM semakin penting di era transformasi digital dan tuntutan pertumbuhan ekonomi yang merata. BPRS menawarkan keunggulan pendekatan syariah, kedekatan sosial, dan inovasi pembiayaan berbasis digital yang menyasar segmen pelaku usaha yang belum sepenuhnya terlayani perbankan konvensional. Tahun 2024–2024 menandai geliat perkembangan positif bagi industri BPRS, baik dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhan aset, maupun volume pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM. Laporan OJK dan KNEKS menunjukkan pertumbuhan DPK dan aset BPRS di atas rata-rata nasional, terutama di provinsi-provinsi dengan basis UMKM kuat dan beragam, seperti di kawasan Sumatra dan Jawa (Anisa et al., 2025; Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Wahyuni et al., 2025).

Di balik capaian positif tersebut, realitas di lapangan menunjukkan terjadinya disparitas regional yang cukup tajam dalam berbagai indikator kinerja BPRS. Sebagian provinsi menunjukkan pertumbuhan pembiayaan UMKM yang pesat, penyerapan DPK yang kuat, dan pertumbuhan aset secara konsisten dari tahun ke tahun. Namun, tidak sedikit juga provinsi yang stagnan atau justru mengalami peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dan penurunan FDR akibat kurang optimalnya penyaluran dana. Disparitas ini menimbulkan konsekuensi kebijakan, baik dalam hal penguatan sistem pendukung di tingkat lokal maupun pengembangan produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan pelaku UMKM setempat (Aprilian & Sudarmawan, 2025; Suhaila et al., 2024).

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya efektivitas penyaluran dana oleh BPRS, baik dalam konteks DPK, aset, maupun pembiayaan UMKM sebagai determinan utama profitabilitas dan keberlanjutan bank Syariah, dimana pertumbuhan aset BPRS memiliki kolerasi langsung dengan tingkat penyaluran dana kepada UMKM dan besaran DPK yang dihimpun dari masyarakat, serta keberhasilan BPRS dalam memperkuat sektor UMKM berbanding lurus dengan pengelolaan risiko pembiayaan dan efisiensi operasional bank (Alfi & Irsyad, 2025; Hariyanto & Nafi'ah, 2022; Sari et al., 2025; Wahab & Mahdiya, 2025; Widarjono, 2025). Di sisi lain, beberapa literatur menyoroti permasalahan NPF yang kerap menjadi ancaman terhadap stabilitas industri BPRS, khususnya di daerah dengan basis ekonomi lemah atau tingkat literasi keuangan yang rendah. Di beberapa wilayah, ekspansi pembiayaan UMKM yang agresif tanpa diimbangi kontrol risiko yang memadai justru meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah. Fenomena ini

menuntut desain kerangka analisis yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan aset atau volume pembiayaan, tetapi juga pada dimensi efisiensi (FDR) dan kualitas risiko (NPF) (Aprilian & Sudarmawan, 2025; Riduwan et al., 2025; Suhaila et al., 2024).

Penelitian ini didasarkan pada konsep intermediasi keuangan yang fundamental bagi semua jenis perbankan, termasuk bank syariah mikro (BPRS). Diamond dan Dybvig (1983) memperkenalkan *bank liquidity creation theory*, yang menegaskan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai intermediary antara deposan yang menghendaki likuiditas dengan peminjam yang membutuhkan pembiayaan berjangka panjang. Dalam konteks syariah, intermediasi ini dilaksanakan melalui prinsip bagi hasil, tanpa riba, dan mengedepankan keadilan sosial (Diamond, 2007; Diamond & Dybvig, 1983; Iqbal & Mirakhor, 2011; Khan, 2009). Teori dan praktik *Islamic finance* menekankan perbedaan signifikan antara sistem syariah dan konvensional, terutama dalam pengelolaan risiko serta penyaluran pembiayaan yang berpihak pada sektor produktif dan UMKM, serta menjelaskan bahwa produk-produk pembiayaan syariah seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, hingga qard hasan, dirancang mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput, relevan khususnya bagi UMKM (Iqbal & Mirakhor, 2011; Khan, 2009; Rahman, 2007).

Dalam kerangka *Islamic microfinance*, pembiayaan UMKM melalui BPRS diyakini dapat memperkuat aset bank serta katalis pertumbuhan ekonomi lokal. Rohman et al., (2021) melakukan review literatur internasional yang menunjukkan kontribusi *Islamic microfinance* terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan modal usaha kecil, dan perkembangan aset lembaga keuangan mikro syariah. Iswanto & Ibadurrahman, (2023) dan Hassan & Aliyu, (2018) menggarisbawahi pentingnya pengelolaan pembiayaan dan likuiditas (DPK dan FDR) dalam menjaga efisiensi serta keberlanjutan bank syariah.

Teori manajemen risiko bank serta konsep NPF (Non Performing Financing) menjadi komponen penting dalam penelitian ini, dimana NPF digunakan untuk menilai kualitas portofolio pembiayaan bank, yang meningkat jika ekspansi pembiayaan tidak diimbangi sistem risk management yang baik (Ariani et al., 2022; Saunders & Allen, 2002). Studi Nugroho et al., (2021) dan Ariani et al., (2022) menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan (NPF) dan efektifitas penyaluran dana (FDR) sangat berpengaruh terhadap *Islamic performance ratio* serta pertumbuhan aset bank syariah. Perkembangan empiris menyimpulkan bahwa pertumbuhan DPK, kualitas pembiayaan, serta kontrol risiko adalah determinan utama profitabilitas dan stabilitas bank di berbagai negara dan secara simultan pengaruh DPK, FDR, dan NPF signifikan terhadap total aset bank syariah nasional. Selain itu, faktor eksternal seperti inflasi dan GDP juga dapat berpengaruh, namun hasil studi lebih menekankan pada kekuatan DPK dan portofolio pembiayaan (khususnya ke UMKM) sebagai sumber fundamental pertumbuhan aset dan stabilitas bank (Ariani et al., 2022; Hassan & Aliyu, 2018; Iswanto & Ibadurrahman, 2023; Ramadhani & Sutrisno, 2022; Shiddiq & Fazaalloh, 2025).

Keterbatasan studi yang menelaah bagaimana penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan UMKM secara bersama-sama berdampak terhadap tiga dimensi kinerja utama BPRS, seperti pertumbuhan aset, rasio FDR, dan

peningkatan/penurunan NPF pada level provinsi secara lintas wilayah dan tahun berjalan belum banyak ditemukan, dimana banyak studi masih bersifat parsial, berfokus pada profitabilitas saja atau hanya membandingkan kinerja antar bank tanpa memperhitungkan konteks wilayah dan spesifik sektor UMKM (Marinda et al., 2020). Oleh karena itu hadirnya penelitian ini menawarkan berupa model simultan yang menguji pengaruh pembiayaan UMKM dan DPK terhadap aset, FDR, dan NPF secara terintegrasi di seluruh provinsi Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memotret realitas kebijakan pada tingkat mikro dan regional secara lebih akurat, sekaligus menyusun peta disparitas, *best practice*, dan potensi area perbaikan dalam pengelolaan BPRS di era transformasi digital perbankan syariah.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan UMKM dan DPK terhadap aset, FDR, dan NPF BPRS antar provinsi tahun 2020-2024. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi provinsi-provinsi yang menjadi role model (*best practice*) maupun yang perlu intervensi penguatan dalam pengelolaan dana serta penyaluran pembiayaan syariah. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi BPRS dalam merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan UMKM—yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan aset bank, tetapi juga menjaga efisiensi penyaluran dan risiko. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan berkontribusi nyata terhadap perumusan strategi dan roadmap pengembangan industri BPRS yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder berdasarkan *Statistik Perbankan Syariah Mikro (BPRS)* pada tingkat provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-korelasional, dengan tujuan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan UMKM terhadap kinerja aset, efektivitas penyaluran dana (FDR), serta risiko pembiayaan (NPF) BPRS antarprovinsi.

Data yang digunakan menggunakan data panel (*cross-section* provinsi dan *time series* tahunan) sehingga memungkinkan analisis dinamika antarwilayah secara simultan. Sumber data utama berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang menyediakan laporan statistik BPRS nasional dan regional. Variabel yang diobservasi meliputi total aset, nominal DPK, pembiayaan UMKM, FDR, dan NPF untuk seluruh provinsi dengan data yang lengkap selama lima tahun.

Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data statistik tahunan dari publikasi resmi OJK, dilanjutkan dengan verifikasi, validasi, dan pembersihan data (*data cleaning*) guna memastikan konsistensi, reliabilitas, serta menghindari *missing value* atau duplikasi data yang dapat menimbulkan bias. Selanjutnya, data diolah menggunakan perangkat lunak Stata, yang dipilih karena keunggulannya dalam analisis regresi data panel, pengujian asumsi klasik, dan estimasi model *robust*.

Analisis deskriptif dilakukan terlebih dahulu untuk menampilkan karakteristik data, tren pertumbuhan aset, penghimpunan DPK, pembiayaan UMKM, serta rasio FDR dan NPF BPRS selama lima tahun terakhir. Setelah itu, dilakukan analisis regresi linier berganda berbasis data panel untuk menguji tiga model utama. Pendekatan regresi linier digunakan karena tujuan penelitian bukan memprediksi

dinamika jangka panjang, melainkan menguji hubungan linier langsung antara penghimpunan dana, pembiayaan produktif, dan indikator kinerja BPRS pada periode yang sama.

$$\text{Model 1: Aset BPRS}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{DPK}_{it} + \beta_2 \text{Pembiayaan UMKM}_{it} + e_{it}$$

$$\text{Model 2: FDR}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{DPK}_{it} + \beta_2 \text{Pembiayaan UMKM}_{it} + e_{it}$$

$$\text{Model 3: NPF}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{DPK}_{it} + \beta_2 \text{Pembiayaan UMKM}_{it} + e_{it}$$

Seluruh model diuji pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ untuk menilai pengaruh nyata antarvariabel. Sebelum estimasi utama, uji diagnostik dilakukan untuk memastikan kelayakan model, meliputi pemeriksaan multikolinearitas dan heteroskedastisitas, sementara potensi pelanggaran autokorelasi dan varians tidak konstan diatasi dengan penggunaan robust standard error. Pemilihan model panel didasarkan pada hasil uji Hausman, yang digunakan untuk menentukan apakah model terbaik adalah *Fixed Effect (FE)* atau *Random Effect (RE)*. Pemilihan model panel dan pengujian Hausman mengikuti pendekatan yang umum digunakan dalam studi perbankan regional (Baltagi & Baltagi, 2008; Greene, 2008; Gujarati & Porter, 2009), sedangkan estimasi robust digunakan sebagaimana direkomendasikan oleh Cameron, (2005); Degryse et al., (2009); dan Wooldridge, (2010) untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi pada data panel lintas wilayah.

Hasil pengujian awal menunjukkan bahwa Model 1 lebih sesuai menggunakan FE, sedangkan Model 2 dan Model 3 cenderung RE. Namun, setelah dilakukan pengujian lanjutan dengan pendekatan *robust estimation* yang mengoreksi heteroskedastisitas dan autokorelasi antar unit *cross-section*, ketiga model menunjukkan hasil yang konsisten dan efisien dalam kerangka *Fixed Effect (FE)*. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan penggunaan model *Fixed Effect* dengan *robust standard error* untuk ketiga model, agar estimasi parameter yang dihasilkan tidak bias, efisien, dan mampu menangkap heterogenitas antarprovinsi secara lebih akurat. Pendekatan FE dipilih karena setiap provinsi memiliki karakteristik unik yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*), seperti tingkat literasi keuangan, kapasitas kelembagaan BPRS, dan dukungan kebijakan daerah, yang berpotensi memengaruhi kinerja BPRS secara konsisten sepanjang waktu. Selanjutnya, hasil estimasi model disajikan dalam bentuk koefisien regresi, nilai R^2 , serta uji signifikansi parameter untuk masing-masing model, guna mengidentifikasi variabel dominan yang memengaruhi kinerja BPRS, baik dari sisi aset, efektivitas penyaluran dana (FDR), maupun risiko pembiayaan (NPF).

Hasil

Hasil statistik deskriptif dari data BPRS di Indonesia memberikan gambaran yang kaya tentang dinamika keuangan dan aktivitas pembiayaan sektor UMKM selama periode 2020 hingga 2024 (**lihat tabel 1**). Dari total 110 observasi, terdapat variasi yang signifikan dalam penyaluran pembiayaan untuk UMKM, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), total aset, serta indikator efisiensi dan risiko pembiayaan di berbagai provinsi. Rata-rata pembiayaan UMKM mencapai Rp369 miliar per unit pengamatan, namun disparitas antar daerah terlihat jelas dari nilai minimum sekitar Rp733 juta hingga maksimum lebih dari Rp3,3 triliun. Demikian pula dengan DPK, di mana rata-rata penghimpunan dana masyarakat sebesar Rp606 miliar, dengan rentang nilai terkecil Rp3,4 miliar dan terbesar hampir Rp4,8 triliun.

Total aset yang dimiliki BPRS tergolong cukup besar secara rata-rata, yaitu sekitar Rp908 miliar, tetapi dengan variabilitas tinggi antara provinsi atau tahun, tercermin dari standar deviasi yang melebihi satu triliun. Beberapa wilayah mencatat aset minimum di kisaran Rp6,3 miliar, sementara aset maksimum menembus Rp7,4 triliun, menunjukkan adanya sentra ekonomi syariah yang sangat maju dibanding daerah lain. Efektivitas penyaluran dana, yang direpresentasikan oleh nilai FDR, menunjukkan rata-rata 106%, pertanda bahwa bank secara umum sangat agresif dalam menyalurkan dana yang dihimpun ke sektor pembiayaan, terutama UMKM. Namun, nilai FDR yang tinggi juga mengindikasikan beberapa BPRS mungkin berada di zona risiko likuiditas jika tidak diiringi manajemen portofolio yang baik.

Tabel 1. Statistik deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
ukm	110	369370.3	664800.2	733.5757	3391612
dpk	110	605618.9	951522.2	3455.339	4759242
asset	110	907988.2	1459444	6340.141	7402390
fdr	110	106.4364	28.1582	34.00247	223.3044
npf	110	8.023052	8.346762	.5486122	45.30491

Sumber: Data sekunder diolah, 2025.

Pada sisi risiko, rasio *Non Performing Financing* (NPF) rata-rata sebesar 8%, merupakan angka yang cukup moderat secara keseluruhan. Tetapi, terdapat kasus dengan NPF minimal hanya 0,5%, menunjukkan kualitas pembiayaan yang sangat baik hingga maksimum 45,3% yang menandakan tingginya pembiayaan bermasalah di beberapa unit BPRS. Hal ini memperlihatkan bahwa performa manajemen risiko dan proses seleksi pembiayaan BPRS sangat bervariasi antar provinsi. Standar deviasi tinggi pada semua variabel utama menegaskan bahwa terdapat disparitas dan ketidaksamaan perkembangan keuangan syariah mikro di seluruh Indonesia.

Secara umum, korelasi antar aset, DPK, dan pembiayaan UMKM sangat kuat dan positif (**lihat tabel 2**). Artinya BPRS dengan dana dan pembiayaan besar otomatis memiliki aset besar pula. FDR yang efisien cenderung menurunkan NPF, namun hubungan antar FDR, aset, dan pembiayaan tidak sekuat DPK dengan aset atau UKM. Korelasi negatif antara FDR dan NPF mengindikasikan bahwa semakin efektif penyaluran dana yang dilakukan bank, maka risiko pembiayaan bermasalah cenderung menurun.

Temuan korelasi ini menunjukkan bahwa antar variabel dari tabel output Stata menggambarkan hubungan linier antara lima indikator keuangan utama BPRS. Tercatat bahwa keterkaitan antara aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sangat kuat, dengan koefisien korelasi mencapai 0.9969. Hal ini berarti BPRS dengan DPK yang besar hampir pasti memiliki aset yang besar pula, memperkuat teori bahwa penghimpunan dana masyarakat merupakan fondasi utama pertumbuhan aset bank syariah mikro di Indonesia. Selain itu, pembiayaan UMKM juga sangat berkorelasi positif dengan aset (0.9666), serta dengan DPK (0.9669), menandakan bahwa penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif diikuti oleh penguatan modal dan dana yang dihimpun BPRS. Sementara itu, hubungan antara aset dan FDR (0.0980) maupun antara aset dan NPF (-0.0697) relatif lemah, memperlihatkan bahwa besaran aset tidak selalu terkait signifikan dengan efisiensi penyaluran dana atau

risiko pembiayaan bermasalah pada tingkat deskriptif korelasi. Korelasi antara FDR dan NPF adalah -0.3015, menunjukkan hubungan negatif yang moderat—semakin tinggi efisiensi penyaluran dana, maka rasio pembiayaan bermasalah cenderung menurun, sesuai dengan harapan manajemen risiko bank syariah.

Tabel 2. Korelasi antar variabel

	asset	fdr	npf	dpk	ukm
asset	1.0000				
fdr	0.0980	1.0000			
npf	-0.0697	-0.3015	1.0000		
dpk	0.9969	0.0641	-0.0504	1.0000	
ukm	0.9666	0.0831	-0.0296	0.9669	1.0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2025.

Kemudian, korelasi antara variabel lain seperti DPK dengan NPF (-0.0504) dan pembiayaan UMKM dengan NPF (-0.0296) juga sangat kecil, mengindikasikan bahwa pada data agregat, lonjakan dana atau pembiayaan tidak otomatis meningkatkan atau menurunkan risiko secara langsung. Sementara FDR dan DPK (0.0641) serta FDR dan UKM (0.0831) memiliki nilai korelasi positif yang sangat kecil, menandakan tidak ada hubungan kuat antara efisiensi penyaluran dana dengan besaran DPK atau volume pembiayaan UMKM.

Hasil estimasi statistik dari ketiga model yang dibangun memberikan gambaran dinamika kinerja dan risiko keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (**lihat tabel 3**). Pada Model 1, terlihat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan penentu utama pertumbuhan aset BPRS. Koefisien regresi DPK pada aset sebesar 0,674 dan sangat signifikan secara statistik, menegaskan bahwa semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, maka semakin besar aset yang dikelola oleh BPRS. Namun, penyaluran pembiayaan UMKM, meski posisinya sangat penting dalam strategi keuangan syariah mikro, ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset dalam periode penelitian ini. Fakta bahwa model ini mampu menjelaskan hingga 83% variasi aset antar BPRS menunjukkan kuatnya peran DPK sebagai fondasi utama penguatan aset bank syariah mikro.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model Panel (*Fixed Effect Robust*)

	(1)	(2)	(3)
VARIABLES	ln Asset	ln FDR	ln NPF
ln_dpk	0.674*** (0.112)	-0.271* (0.131)	-0.285 (0.336)
ln_ukm	0.071 (0.058)	0.266*** (0.092)	-0.103 (0.247)
Constant	3.550*** (0.907)	4.887*** (0.667)	6.342*** (1.475)
Observations	110	110	110
R-squared	0.832	0.326	0.107
Number of id	22	22	22

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Berbeda dengan model aset, Model 2 mengkaji efisiensi penyaluran dana melalui indikator Financing to Deposit Ratio (FDR). Di sini, pembiayaan UMKM justru menjadi faktor penentu utama, dengan koefisien positif yang sangat signifikan (0,266). Artinya, peningkatan pembiayaan pada sektor UMKM di seluruh provinsi diikuti oleh semakin tinggi efisiensi penyaluran dana, dimana BPRS lebih banyak menyalurkan seluruh dana masyarakat ke sektor produktif UMKM. Sebaliknya, DPK ternyata memiliki efek negatif signifikan terhadap FDR. Ini mengindikasikan bahwa ketika dana yang dihimpun BPRS bertambah secara drastis tanpa diikuti ekspansi pembiayaan, proporsi penyaluran dana relatif menurun, sehingga efisiensi pemanfaatannya cenderung menurun. Namun, secara umum, model FDR ini hanya mampu menjelaskan sekitar 32% variasi efisiensi antar BPRS, menandakan masih banyak faktor lain di luar DPK dan UMKM yang berpengaruh pada FDR.

Model ketiga mengangkat isu risiko pembiayaan yang direpresentasikan oleh Non Performing Financing (NPF). Menariknya, baik DPK maupun pembiayaan UMKM tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPF pada BPRS. Koefisien regresi keduanya negatif namun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan volume dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan UMKM secara agregat tidak otomatis meningkatkan atau menurunkan risiko pembiayaan bermasalah. Model ini pun hanya menjelaskan sekitar 11% variasi NPF antar BPRS, menguatkan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan syariah mikro dipengaruhi banyak faktor eksternal lain, seperti kualitas seleksi debitur, tata kelola internal, serta kondisi ekonomi regional.

Keseluruhan hasil regresi ini memperlihatkan pola yang saling melengkapi: DPK adalah motor utama pertumbuhan aset, pembiayaan UMKM meningkatkan efektivitas penyaluran dana, namun kontrol risiko (NPF) membutuhkan strategi dan kebijakan manajemen yang lebih kompleks dan holistik. Temuan ini memperkuat pentingnya peran intermediasi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjaga efisiensi dan stabilitas institusi keuangan mikro berbasis syariah. Berdasarkan hasil estimasi model regresi, menunjukkan secara empiris dari tabel bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan UMKM berperan dalam menentukan kinerja dan risiko BPRS di seluruh provinsi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat dan sekaligus memperkaya kesinambungan teori intermediasi dan literatur perbankan syariah mengenai determinan utama kinerja dan risiko BPRS di Indonesia. Temuan empiris bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi penentu paling signifikan terhadap pertumbuhan aset BPRS sangat selaras dengan teori intermediasi klasik (Diamond & Dybvig, 1983) dan penjelasan (Iqbal & Mirakhor, 2011) tentang pentingnya penghimpunan dana masyarakat dalam memperkuat kapasitas dan likuiditas bank syariah mikro. Hasil temuan bahwa DPK memegang peran sentral dalam menentukan besaran aset BPRS sejalan dengan studi yang telah dilakukan oleh Hassan & Aliyu, (2018) dan Iswanto & Ibadurrahman, (2023) yang juga menemukan bahwa DPK adalah motor utama ekspansi total aset bank, baik pada konteks perbankan syariah global maupun Indonesia. Bahkan, dalam riset Shiddiq & Fazaalloh, (2025) menyatakan bahwa hubungan DPK dengan aset cenderung lebih kuat ketimbang dengan variabel lain seperti total pembiayaan atau profitabilitas.

Pada sisi pembiayaan UMKM, temuan bahwa penyaluran ke sektor produktif sangat berpengaruh terhadap FDR dan kinerja intermediasi juga konsisten dengan penelitian Rohman et al., (2021) yang menegaskan bahwa pembiayaan produktif lewat *microfinance* berbasis syariah tidak otomatis menaikkan aset, tetapi sangat efektif memperbaiki efisiensi bank. Fenomena ini juga terlihat dalam tinjauan literatur Hassan & Aliyu, (2018) dan Khan, (2009), di mana pada negara berkembang khususnya dalam konteks mikrobank syariah, ekspansi intermediasi yang sehat sangat ditopang oleh pembiayaan sektor UMKM. Demikian pula, penelitian empiris oleh Ariani et al., (2022); dan Nugroho et al., (2021) pada tataran regional Indonesia membuktikan bahwa bank yang agresif menyalurkan pembiayaan UMKM mampu menaikkan rasio penyaluran dana, meski tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan aset atau laba. Selanjutnya, hasil regresi yang tidak signifikan antara DPK maupun pembiayaan UMKM terhadap NPF (risiko pembiayaan bermasalah) menambah keyakinan terhadap literatur (misal, studi Salsabilla & Jaya, (2024); Saunders & Allen, (2002); dan Shiddiq & Fazaalloh, (2025)), menyatakan bahwa aspek *risk management* dalam *microfinance* syariah sangat kontekstual dan bergantung pada faktor *beyond volume*. Artinya, kualitas bank dalam melakukan *due diligence* nasabah, desain produk, serta ekosistem UMKM di regional menjadi kritikal dalam menjaga stabilitas NPF.

Implikasi dari kesinambungan penelitian ini bukan hanya mempertegas peran DPK serta UMKM dalam mendorong aset dan efisiensi bank, tetapi juga memperingatkan bahwa lonjakan aset atau pembiayaan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan bila praktik mitigasi risiko dan manajemen internal belum mapan. Dengan begitu, temuan ini tidak hanya menambah daftar bukti empiris yang konsisten dengan teori dan penelitian terdahulu, tetapi juga memberi kontribusi baru tentang pentingnya integrasi antara strategi mobilisasi dana, perluasan pembiayaan produktif, dan inovasi manajemen risiko ke dalam kebijakan maupun praktik pengelolaan BPRS di era digitalisasi dan ketidakpastian ekonomi saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan kesinambungan yang kuat dengan berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas peran Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan UMKM dalam mendukung kapasitas aset dan efisiensi perbankan syariah mikro. Sejumlah studi internasional dan nasional, seperti yang dilakukan Hassan & Aliyu, (2018) dan Iswanto & Ibadurrahman, (2023), membuktikan bahwa kekuatan penghimpunan dana masyarakat (DPK) berperan vital bagi pertumbuhan aset, baik pada konteks bank syariah mikro di Indonesia maupun lembaga keuangan syariah di kawasan Asia dan Timur Tengah. Temuan ini juga konsisten dengan kajian Iqbal & Mirakhor, (2011) yang menjelaskan konsep intermediasi perbankan syariah, dimana keberhasilan mobilisasi dana masyarakat akan secara langsung memperbesar kapasitas aset dan daya tahan bank.

Pada aspek pembiayaan UMKM, temuan positif terhadap FDR memperkuat hasil studi Khan, (2009); dan Rohman et al., (2021), yang menyimpulkan bahwa penyaluran dana ke sektor produktif, khususnya UMKM merupakan strategi utama dalam meningkatkan efektivitas intermediasi dan fungsi sosial bank syariah. Kajian Ariani et al., (2022); dan Hassan & Aliyu, (2018) juga menunjukkan bahwa penetrasi ke sektor UMKM secara empiris berdampak langsung pada kenaikan efektivitas penyaluran dana dan inklusi keuangan, memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan berbasis prinsip syariah. Adapun

ketidaksignifikanan pengaruh DPK dan pembiayaan UMKM terhadap rasio NPF (risiko pembiayaan bermasalah) juga mendapatkan legitimasi dalam literatur *risk management* terkini (Salsabilla & Jaya, 2024; Saunders & Allen, 2002). Beberapa studi, seperti penelitian Nugroho et al., (2021); dan Shiddiq & Fazaalloh, (2025), menegaskan bahwa risiko pembiayaan bank syariah mikro tidak semata-mata berdasarkan volume dana atau pembiayaan, melainkan sangat dipengaruhi tata kelola bank, seleksi debitur, pengawasan internal, serta kondisi ekonomi daerah dan inovasi digital perbankan.

Oleh karena itu, implikasi hasil penelitian ini terhadap konteks kontemporer menjadi sangat penting, terutama dalam era digitalisasi, persaingan pasar keuangan mikro, dan tuntutan kebijakan inklusi keuangan syariah nasional. Temuan empiris ini menyarankan agar BPRS harus terus fokus memperkuat penghimpunan dana masyarakat (DPK) sebagai pondasi utama pertumbuhan aset, namun harus memperhatikan efisiensi dan risiko penyaluran dana UMKM melalui inovasi teknologi, penguatan tata kelola, serta pembaruan proses risk management. Integrasi dan sinergi strategi di ketiga aspek inilah yang secara empiris dan teoretis akan mendorong optimalisasi peran BPRS sebagai agen inklusi dan pemberdayaan ekonomi syariah yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menghadirkan sejumlah kebaruan teoretis, metodologis, dan empiris yang membedakannya dari studi terdahulu. **Pertama**, secara empiris, penelitian ini merupakan studi komprehensif yang secara simultan menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan UMKM terhadap tiga indikator utama kinerja BPRS: aset, efektivitas penyaluran dana (FDR), dan risiko pembiayaan (NPF), dengan menggunakan data panel lintas provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Pendekatan ini memungkinkan analisis lintas-waktu dan lintas-wilayah yang belum banyak dilakukan dalam konteks perbankan syariah mikro.

Kedua, secara metodologis, penggunaan model Fixed Effect dengan robust standard error memberikan kontribusi teknis baru dalam studi keuangan syariah, karena mampu mengoreksi heteroskedastisitas dan autokorelasi lintas-provinsi yang sering diabaikan pada penelitian sejenis, dan **ketiga**, secara konseptual, penelitian ini memperluas penerapan *Islamic financial intermediation theory* ke konteks mikroregional Indonesia dan menegaskan bahwa determinan efisiensi (FDR) tidak selalu identik dengan determinan pertumbuhan aset, sementara risiko pembiayaan (NPF) lebih ditentukan oleh faktor tata kelola dan kelembagaan daripada besaran dana atau pembiayaan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur perbankan syariah mikro dan memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan penguatan strategi mobilisasi dana, optimalisasi pembiayaan produktif, serta inovasi manajemen risiko bagi BPRS di era digitalisasi dan inklusi keuangan nasional.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini secara konsisten menemukan bahwa DPK merupakan faktor paling dominan dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan aset BPRS. Kuatnya peran DPK menegaskan bahwa kemampuan BPRS dalam menghimpun dana masyarakat adalah pondasi utama dalam membesarkan kapasitas dan daya saing keuangan syariah mikro di tingkat regional. Analisis juga menunjukkan bahwa

komitmen penyaluran pembiayaan UMKM sangat berkontribusi positif pada peningkatan efisiensi penyaluran dana, yang tercermin dari rasio FDR yang semakin optimal pada BPRS dengan volume pembiayaan UMKM yang tinggi. Dengan kata lain, penetrasi BPRS ke sektor produktif berbasis UMKM tidak hanya memperkuat fungsi intermediasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan dana publik.

Namun demikian, baik penghimpunan DPK maupun ekspansi pembiayaan UMKM secara agregat tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini menyiratkan bahwa kualitas manajemen risiko dan efektivitas pengawasan internal BPRS, bersama adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan karakter UMKM lokal, merupakan determinan utama dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan syariah mikro. Oleh karena itu, secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya strategi penguatan dana masyarakat dan perluasan pembiayaan UMKM bagi optimalisasi kinerja BPRS, namun menekankan pula perlunya inovasi dan penguatan aspek manajemen risiko agar peran BPRS semakin efektif sebagai katalis inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan dan pengembangan praktik BPRS yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digitalisasi dan kebutuhan riil perekonomian nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, BPRS di Indonesia disarankan untuk memprioritaskan strategi peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebagai fondasi utama pertumbuhan aset dan daya saing institusi. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan yang lebih terfokus pada sektor UMKM terbukti mampu meningkatkan efektivitas intermediasi dan efisiensi penggunaan dana. Namun, untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan, penguatan manajemen risiko, tata kelola internal, serta digitalisasi proses seleksi dan monitoring debitur perlu terus diadaptasi. Dalam konteks kebijakan, sinergi dan insentif dari regulator sangat diperlukan guna mempercepat transformasi BPRS menjadi pilar utama inklusi dan pembiayaan syariah mikro yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Berkaitan dengan penelitian selanjutnya, disarankan agar analisis diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, tingkat literasi keuangan masyarakat, inovasi teknologi digital, serta kualitas tata kelola internal yang lebih terperinci pada masing-masing BPRS. Metode panel data atau pendekatan longitudinal sebaiknya digunakan agar pola dan dampak dinamis dapat teridentifikasi lebih komprehensif. Penelitian ke depan juga dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas layanan pelanggan, tingkat inklusi keuangan, serta interaksi kebijakan nasional dan lokal guna memperkaya pemahaman terhadap strategi dan tantangan penguatan perbankan syariah mikro di Indonesia.

Referensi

- Akbar, Z. A. (2024). Efektivitas Pembiayaan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Umkm Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 177–203.
- Alfi, R. N., & Irsyad, M. (2025). Pengaruh GCG, DPK, NPF, dan Ukuran Bank terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 6(4), 663–671. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i4.7340>

- Anisa, V. N., Supriani, I., & Tumewang, Y. K. (2025). Assessing The Role Of Islamic Banking In Driving Indonesia's Economic Growth During Covid-19. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(3), 403–444. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i3.290>
- Aprilian, R. Z., & Sudarmawan, B. N. (2025). NPF of Islamic Rural Banks in Indonesia: Do Socio-Economic Factors and Bank Performance Matter? *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 405–422. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i2.10307>
- Ariani, R. S., Parno, P., & Pratiwi, A. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA) Terhadap Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 32–46. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.3958>
- Baltagi, B. H., & Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data* (Vol. 4). Springer.
- Cameron, A. C. (2005). *Microeconometrics: methods and applications*. Cambridge University.
- Degryse, H., Kim, M., & Ongena, S. (2009). *Microeconometrics of banking: methods, applications, and results*. Oxford University Press.
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Diamond, D. W. (2007). Banks and liquidity creation: a simple exposition of the Diamond-Dybvig model. *FRB Richmond Economic Quarterly*, 93(2), 189–200.
- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419.
- Greene, W. H. (2008). The econometric approach to efficiency analysis. *The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth*, 1(1), 92–250.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometric* (5th ed.). McGraw –Hill: New York.
- Hariyanto, H., & Nafi'ah, B. (2022). Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 945–954. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3780>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118390474>
- Iswanto, B., & Ibadurrahman. (2023). The Influence of CAR, FDR, Inflation, GDP, Mudharabah Financing, and Musyarakah Financing on NPF of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(2), 71–82. <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.102-07>
- Khan, A. A. (2009). *Islamic microfinance: Theory, policy and practice*. Islamic Relief Worldwide.
- Marinda, R. S., Asngari, I., & Mukhlis, M. (2020). Investigating the effect of total assets, financing, and third-party funds on Islamic Banking Revenue in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 85–94. <https://doi.org/10.29259/jep.v18i2.10355>

- Nugroho, L., Badawi, A., Nugraha, E., & Putra, Y. M. (2021). What Determines Islamic Performance Ratio of Islamic Banking in Indonesia? An Analysis Using Financing to Deposit Ratio as Moderator. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 104–123. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9314>
- Pratama, M. A., & Relaksana, R. (2025). Efektivitas Perbankan Syariah Terhadap Ekspansi Umkm: Tinjauan Empiris Di Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(4), 121–130.
- Rahman, A. (2007). Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 38–53.
- Ramadhani, L., & Sutrisno. (2022). Factors Affecting Financing on Islamic Rural Bank in Yogyakarta and Central Java Province. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 06(06), 27–40. <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2022.6603>
- Riduwan, Adha, M. A., Nahar, F. H., & Fathurrahman, A. (2025). The Analysis of Financing Risk and Its Mitigation Based on Gender: A Study on Islamic Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 8(2), 293–308.
- Rohman, P. S., Fianto, B. A., Ali Shah, S. A., Kayani, U. N., Suprayogi, N., & Supriani, I. (2021). A review on literature of Islamic microfinance from 2010-2020: lesson for practitioners and future directions. *Heliyon*, 7(12), e08549. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08549>
- Salsabilla, L. Z., & Jaya, T. J. (2024). The impact of non-performing financing and operational efficiency on the stability of Islamic banks in Persian Gulf countries. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 623–640. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art1>
- Sari, W., Wardatussaniah, S., Nur'aeni, N., & Pramayuda, A. (2025). Pengaruh DPK, CAR, Firm Size dan TAT terhadap ROA di BPRS HIK Parahyangan. *Economics Professional in Action (E-Profit)*, 7(1), 95–103. <https://doi.org/10.37278/eprofit.v7i1.1247>
- Saunders, A., & Allen, L. (2002). *Credit risk measurement: New approaches to value at risk and other paradigms*. John Wiley & Sons.
- Shiddiq, M. J., & Fazaalloh, A. M. (2025). Capital Adequacy Ratio, Third-Party Funds and Interest Rates Impact on Profitability. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, 4(2), 215–226.
- Suhaila, N., Nasir, M., & Zulkarnain, T. (2024). Analysis of Internal and External Factors On Asset Growth at PT. BPRS Aceh Province. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 12(05), 6345–6354. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v12i05.em08>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2025). The Role of Islamic Micro Finance in Promoting Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 2(2), 112–122. <https://doi.org/10.61132/ijems.v2i2.674>
- Wahyuni, N., Abidin, Z., & Kamaruddin, K. (2025). Impact Of Islamic Financing On Increasing Welfare Of Umkm In South Sulawesi. *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)*, 6(2), 8–15.
- Widarjono, A. (2025). Determinant of sharia rural bank profitability: Do size and location matter? *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 15(2), 139–

154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v15i2.139-154>
Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*. MIT press.